

POLA DAN STRATEGI PERBAIKAN PERMUKIMAN KUMUH DI PERKOTAAN

Ari Widyati Purwantiasning

*Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta
Cempaka Putih Tengah 27 Jakarta Pusat 10510
arwityas@yahoo.com*

ABSTRAK. *Tulisan ini akan membahas sedikit banyaknya tentang pola dan strategi perbaikan permukiman kumuh di perkotaan khususnya DKI Jakarta yang dinilai terlalu banyak kantong-kantong permukiman kumuh. Pola dan strategi perbaikan yang dibahas dalam tulisan ini meliputi pola dan strategi perbaikan permukiman kumuh dari yang pertama digulirkan oleh pemerintah maupun yang sampai saat ini masih diterapkan oleh pemerintah.*

Kata kunci: strategi, pola, permukiman kumuh

ABSTRACT. *This paper will discuss more or less about strategies and patterns of slum settlement improvement programme within cities, particularly DKI Jakarta. DKI Jakarta has been regarded as a city which has many slum areas' within it. Strategies and patterns of improvement programme which will be discussed in this paper include patterns and strategies of initial programme which had been delivered by government as well as programme which is still employed by government..*

Keywords: strategies, patterns, slum settlement

PENDAHULUAN

Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan. Permukiman dapat diartikan sebagai perumahan atau kumpulan rumah dengan segala unsur serta kegiatan yang berkaitan dan yang ada di dalam permukiman. Permukiman dapat terhindar dari kondisi kumuh dan tidak layak huni jika

pembangunan perumahan sesuai dengan standar yang berlaku, salah satunya dengan menerapkan persyaratan rumah sehat.

Permukiman kumuh tumbuh antara lain akibat dari urbanisasi, migrasi yang tinggi, masyarakat berbondong-bondong datang ke kota untuk mencari nafkah, hidup di kota sebagai warga dengan mata pencaharian terbanyak pada sektor informal. Pada dasarnya pertumbuhan sektor informal bersumber pada urbanisasi penduduk perdesaan ke kota, atau dari kota satu ke kota lainnya. Hal ini adalah diakibatkan karena lahan pertanian dimana mereka tinggal, sudah terbatas, bahkan kondisi desapun tidak bisa lagi menyerap angkatan kerja yang terus bertambah. Sedangkan yang migrasi dari kota ke kota lain, kota tidak lagi mampu menampung, karena lapangan kerja sangat terbatas. Akibatnya, terlihat adanya pemanfaatan ruang yang tidak terencana di beberapa daerah, terjadi penurunan kualitas lingkungan bahkan kawasan permukiman. Pesatnya urbanisasi dan tidak seimbangya perkembangan perkotaan merupakan masalah bersama kota-kota besar di Indonesia. Jakarta sebagai kota metropolitan yang merupakan kota utama (*primary city*) mempunyai masalah yang sama dalam hal peningkatan jumlah penduduk dan pemerataan tingkat kesejahteraan penduduknya.

Berbagai kecenderungan untuk menciptakan sebuah lingkungan kumuh baru merupakan dampak dari kondisi kemiskinan yang ada di Jakarta. Ketidakmampuan dalam pengelolaan pengembangan Sumber Daya Manusia juga merupakan awal mula terjadinya peningkatan kemiskinan. Berbagai usaha pemerintah telah dilaksanakan dalam peningkatan kualitas permukiman di Jakarta. Selain itu usaha penataan kawasan kumuh juga merupakan salah satu program dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya, beberapa program digulirkan untuk meningkatkan kualitas permukiman, dan salah satu usaha pemerintah yaitu dengan dilaksanakannya berbagai perbaikan kampung yang pada awalnya disebut sebagai *Kampung Improvement Programme* atau lebih dikenal dengan Proyek MHT (Muhammad Husni Thamrin). Tujuan Program ini pada awalnya adalah untuk memperbaiki kondisi lingkungan perumahan di dalam kota yang kumuh dan tidak sehat, agar masyarakat dapat tinggal dalam lingkungan perumahan yang lebih sehat dan lebih nyaman, dengan melaksanakan program perbaikan kondisi rumah mereka masing-masing dan prasarana fisik lingkungan.

PROGRAM PERBAIKAN KAMPUNG

Pertumbuhan daerah pemukiman yang diakibatkan oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup pesat menyebabkan lingkungan perumahan sangat membutuhkan peningkatan dan perbaikan fasilitas-fasilitas yang ada, khususnya lingkungan kampung. Agar masyarakat dapat tinggal dalam lingkungan perumahan yang sehat dan nyaman, maka salah satu usaha yang harus dilakukan adalah dengan mengadakan perbaikan terhadap lingkungan rumah itu. Hal ini bisa dilakukan dengan biaya swadaya dari masyarakat sendiri atau mendapat bantuan dari pemerintah. Salah satu program pemerintah untuk membantu penyediaan fasilitas perumahan di kampung adalah *Kampung Improvement Programme* yang dikenal dengan KIP. (Dinas Pekerjaan Umum, 1987)

Pada dasarnya perbaikan kampung merupakan perbaikan fasilitas umum lingkungan kampung karena keterbatasan fasilitas-fasilitas yang ada dan pemeliharaan yang tak memadai sehingga mempercepat proses kerusakan yang menjadi suatu problem tersendiri yang harus ditanggulangi demi peningkatan suatu kualitas lingkungan permukiman kampung. Hal-hal tersebut adalah peningkatan kualitas jalan-jalan kampung, pengadaan air minum dan pelayanan sosial yang lebih baik, misalnya : adanya pelayanan kesehatan (Puskesmas atau Posyandu), MCK (Mandi, Cuci, Kakus), dan lain-lain (www.digilib.petra.ac.id, 2009)

PROYEK MHT

Salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam menanggulangi masalah perumahan dan permukiman bagi masyarakat miskin adalah dengan dilaksanakannya suatu program perbaikan serta konsolidasi perumahan dan permukiman secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Program perbaikan ini terjadi karena adanya/ timbulnya beberapa permukiman liar yang kemudian berkembang menjadi kumuh, tidak teratur dan illegal. Awal dari tumbuhnya permukiman ini karena adanya berbagai pendatang/ migran yang merintis usaha dalam sektor informal dan memanfaatkan tanah kosong untuk dijadikan hunian sementara.

Adanya kawasan perkampungan kumuh ini cenderung mengarah pada ketidaktertiban. Hal ini mendorong pemerintah untuk turun tangan dan dimulai

dengan dilaksanakannya program perbaikan beberapa kampung di Jakarta yang disebut sebagai *Kampung Improvement Programme* atau Program Nasional Mohammad Husni Thamrin, dilanjutkan dengan adanya Instruksi Presiden No. 5 tahun 1990 dan terakhir adalah program IDT. (*Peluang di Kampung Kumuh, Properti Indonesia*)



Kampung adalah suatu daerah perumahan yang keadaannya fisik tidak memenuhi syarat kebutuhan dan kehidupan yang layak, dimana penduduk kurang memelihara daerahnya yang miskin serta kemampuan materinya rendah. Program perbaikan kampung yang dikenal dengan nama *Kampung Improvement Programme* yang disingkat KIP pada kenyataannya bukan suatu program baru di Indonesia. Kegiatan tersebut telah ada pada waktu penjajahan Belanda dengan nama *Kampoeng Verbetermg*. Tujuan program ini pada awalnya adalah untuk memperbaiki kondisi lingkungan perumahan kampung di dalam kota yang kumuh dan tidak sehat, agar masyarakat dapat tinggal dalam lingkungan perumahan yang lebih sehat dan lebih nyaman. Dengan adanya perbaikan kondisi rumah mereka masing-masing dan prasarana fisik lingkungan kampung. Tetapi ada perbedaan yang mendasar antara KIP pada waktu itu dengan yang sekarang kita lihat. Dahulu KIP lebih diarahkan untuk menanggapi politik etis yang dilancarkan kaum oposisi di Parlemen Belanda, dan sekaligus untuk melindungi warga Eropa yang tinggal di dekat kampung dari bahaya epidemi. Orientasi KIP pada waktu itu hanya pada aspek sanitasi saja, amat sederhana. Selama tahun 1984-1990 KIP di Surabaya telah mengembangkan 70 km jalan masuk, 150 km jalan setapak, 93 km saluran, 56 km saluran pembuangan dari pipa, 86 MCK umum telah dibuat.

Konsep pelaksanaan program perbaikan kampung pada awalnya sangat sederhana. Untuk meningkatkan kondisi fisik lingkungan perumahan kampung sarasannya adalah :

- mengurangi genangan air diwaktu hujan, dengan cara memperbaiki sistem saluran drainase dan pengerasan jalan-jalan dalam kampung.
- meningkatkan pengadaan air bersih, dengan cara pemasangan kran- kran umum di beberapa tempat.
- mengurangi gangguan sampah, dengan cara memperbaiki sistem pembuangan sampah melalui pengadaan gerobak-gerobak sampah, tong, dan bak sampah.
- meningkatkan kondisi sanitasi lingkungan, dengan cara pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus atau MCK.

Selain sasaran diatas, ada beberapa hal juga yang mendapatkan bantuan dalam pembangunan fasilitas-fasilitas umum bagi masyarakat kampung seperti fasilitas kesehatan, pendidikan seperti Puskesmas, Pos Pelayanan Kesehatan, perbaikan Sekolah Dasar, dan lain-lain.

Evaluasi di Jakarta pada tahun 1983 (Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat, 1990) menunjukkan bahwa investasi dan kondisi rumah pada kampung yang menerima KIP lebih baik daripada kampung yang tidak menerima KIP, sehingga baik kampung yang menerima KIP dan tidak, untuk memperbaiki rumah mereka menggunakan bahan dengan kualitas yang baik dan permanen sebagai ganti dari bambu dan kayu. Kebanyakan rumah memiliki dinding dari semen, tile/terasso dan lantai dari semen, dan atap seng. Kemajuan pada kampung yang menerima KIP bagaimanapun juga lebih cepat. (*www.worldbank.org,2009*)



Program perbaikan kampung (KIP) di Jakarta yang lebih dikenal sebagai Proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT) tersebut merupakan kasus yang terbaik dan paling cocok saat itu sebagai *on-site upgrading*. Program KIP ini pada saat itu difokuskan dan terbatas pada perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan. Selain itu KIP juga menekankan pada penyediaan infrastruktur dalam permukiman eksisting masyarakat berpenghasilan rendah.



Selain dari tujuan untuk meningkatkan kondisi sosial dan fisik dari kampung-kampung di Jakarta melalui perbaikan fisik, selanjutnya tujuan ditekankan pada pemberian dorongan kepada masyarakat untuk melaksanakan gotong royong atau *community self help*.

Proyek MHT dimulai 1969-1974 (Pelita I) saat penduduk DKI Jakarta masih 4,8 juta jiwa dan diperkirakan 60 persen tinggal di kawasan permukiman kumuh. Jauh sebelum itu, Hindia Belanda juga pernah melakukan perbaikan kampung di Batavia pada 1926.

Proyek ini dicanangkan bersamaan Repelita I Nasional. Hasil Proyek MHT meliputi perbaikan kampung seluas 2.400 ha. Jumlah penduduk yang dibenahi mencakup 1,2 juta orang, dengan biaya per kapita 13 dollar AS.

Kemudian pada Proyek MHT I (1974-1979 atau Pelita II), Bank Dunia mulai mengamati proyek perbaikan kampung ini serta memberi pinjaman anggaran selama dua tahun. Keputusan sidang DPRD Jakarta Nomor 28 Tanggal 23 Maret 1972 menyebut, proyek ini dinamakan Proyek Muhammad Husni Thamrin, sebagai penghargaan bagi pejuang Betawi melawan Belanda.

Pada Proyek MHT II (1979-1984 atau Pelita III), proyek ini memperoleh penghargaan dari Yayasan Aga Khan di bidang arsitektur. Pemda DKI Jakarta dinilai berani menentukan pilihan menangani permukiman informal yang sejak 1969 belum pernah ada proyek serupa di dunia. Selanjutnya Proyek MHT III (1984-1989 atau Pelita IV) diteruskan. Pada 1986, untuk pertama kali pengelola Proyek MHT dilibatkan dalam proyek peremajaan kampung kumuh dengan menggusur warga dan membangun rumah susun berlantai empat di Tambora dan Karang Anyar. Hingga kini, sudah ada 25 rumah susun di Ibu Kota.

Proyek MHT III (1990-2000, Pelita V) mengalami perubahan paradigma, karena memandang permukiman bukan sekadar kumpulan rumah-rumah, melainkan sebagai habitat berbagai macam kegiatan, interaksi sosial dan pranatanya serta kegiatan usaha yang tumbuh dari akar rumput. Dari sudut manajemen perkotaan, pemerintah tidak lagi menjadi penyedia. Fungsi pemerintah hanya pendorong. Hasilnya, sebagian besar dari 85 kelurahan di lima wilayah kota yang melaksanakan perbaikan kampung dengan pendekatan ini mengalami sukses.

Di balik suksesnya proyek MHT yang telah mengubah lingkungan permukiman kumuh dengan luas dan cakupan penduduk begitu besar itu, ada hal-hal penting dalam perjalanan MHT. Pada tahun 1983, pengelolaan Proyek MHT dilebur dalam Dinas Perumahan.

Di samping itu, Proyek MHT III juga mulai mengembangkan "tribina", yakni setiap perbaikan lingkungan permukiman senantiasa diiringi pembinaan sosial, ekonomi dan fisik. Selama 10 tahun terakhir, Proyek MHT telah memperbaiki 85 kelurahan (599 RW), dengan penduduk mencapai 1,7 juta jiwa. Data keberhasilan ini belum termasuk luas cakupan dan jumlah penduduk pada proyek sebelumnya, yang tentunya lebih besar lagi.

Beberapa kriteria dan ciri-ciri kampung telah diberikan sebelumnya, tetapi pada pelaksanaan program MHT ini ada 6 kriteria yang digunakan untuk memilih kampung yang sesuai untuk pengguliran proyek KIP. Keenam kriteria tersebut adalah:

- a. kondisi fisik (daerah yang paling buruk akan diberikan prioritas terlebih dahulu)
- b. kepadatan penduduk (daerah yang terpadat akan diberikan prioritas)
- c. potensi dinamis dari masyarakat setempat untuk melanjutkan program perbaikan tersebut
- d. mendukung dan mensejajarkan pelaksanaan Rencana Pengembangan Kota Metropolitan Jakarta (d disesuaikan dengan zoning dari Master Plan)
- e. perkembangan sejarah (daerah yang lebih tua akan diprioritaskan)
- f. menjadwalkan perbaikan sehingga manfaat-manfaatnya akan disebar pada sebagian besar daerah di kota, sesuai dengan kriteria di atas

Melalui pendekatan tersebut, 87 buah kampung terpilih untuk pertama kalinya, sebagai awal program 5 tahun perbaikan dari mulai tahun 1969/1970 sampai dengan 1973/1974. Hampir sebagian besar kampung dibangun sebelum tahun 1956 dan berada di daerah yang kumuh dengan kepadatan rata-rata 512 org/ ha yang kemudian meningkat menjadi lebih dari 1500 org/ha di dalam kota tua Jakarta.



Faktor-faktor yang berpengaruh pada perbaikan kampung terpilih adalah kemampuan dari penghuni kampung untuk bekerja sama, menyerap efek negatif dari perbaikan seperti halnya memperluas jaringan infrastruktur yang dirasa perlu, setelah program yang resmi diselesaikan.

Setiap kampung yang akan dipilih, didatangi dan dilakukan survei serta pengamatan mengenai aksesibilitasnya pada pelayanan fisik. Pekerjaan tipikal yang dilakukan pada proyek MHT ini meliputi pekerjaan-pekerjaan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu jalan setapak dan jalan kendaraan, jembatan, drainase, sumur dan pompa umum serta kincir angin bila memungkinkan untuk mengalirkan air dimana akses menuju sumber air sangat sulit dicapai, MCK, rehabilitasi saluran air, klinik dan puskesmas, tempat sampah dan tempat pembuangan umum, sekolah, musholla dan tempat ibadah lainnya.

Pemerintah menyediakan berbagai peralatan dan pekerjaannya untuk melaksanakan program pelayanan masyarakat seperti klinik dan musholla. Dilain pihak, pusat komunitas juga dibentuk, tetapi di bawah program yang terpisah. Masalah-masalah tersebut di atas dirasakan merupakan hal yang terpenting bagi peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan para penghuni.



Sejak awal tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan dana yang tersedia untuk kepentingan masyarakat sebanyak-banyaknya sehingga dapat mengakses pelayanan dasar. Penyediaan saluran listrik termasuk dalam program, hanya saja diperuntukkan untuk kampung yang terpilih yaitu dimana penghuninya mampu untuk membayar pelayanan dan tagihannya.

Pada saat evaluasi dan monitoring program diselesaikan, dapat diindikasikan bahwa penghuni kampung sangat senang dan puas dengan hasil perbaikan dan standar yang lebih tinggi dari pemeliharaan kampung. Hal tersebut memperlihatkan adanya tanggung jawab dan kerjasama menyeluruh pada program MHT. Dari keseluruhan kampung yang terpilih, hanya 5 buah kampung yang dihentikan program keberlanjutannya karena faktor penolakan dari masyarakat setempat berkaitan dengan faktor sosial dan budayanya.

Kampung Improvement Programme mendorong pembangunan perumahan dan perbaikan perumahan serta menunjang munculnya lapangan pekerjaan baru di bidang industri pembangunan local. Secara umum terlihat bahwa penghuni tinggal di kampungnya, menggunakan segala manfaat dan hasil dari perbaikan tersebut, tidak menjualnya atau pindah ke lain tempat untuk membentuk kampung-kampung baru. Selain itu, terdapat peningkatan penghasilan dan kondisi ekonomi penghuni kampung yang mengikuti program, dibandingkan dengan kampung yang tidak masuk dalam daftar program KIP.

Dari program MHT yang telah terlaksana ini, muncul issue mengenai masalah partisipasi masyarakat atau komunitas setempat selama perencanaan dan pelaksanaan KIP yang dianggap menjadi sesuatu yang kompleks.

Meskipun ada konsultasi marginal dalam perencanaan dan hanya beberapa keterlibatan selama pelaksanaan KIP, secara umum tingkat partisipasi komunitas berbeda dari kampung ke kampung. Di beberapa kampung, masyarakat mengkonsultasikan beberapa masalah seperti lokasi jalan dan pedestrian dan sedikit pada lokasi kran hidran dan MCK. Alat utama konsultasi adalah menyelenggarakan pertemuan di kelurahan. Serupa, masyarakat bekerja melalui RT yang membantu aspek-aspek sederhana pelaksanaan KIP seperti pembongkaran pagar atau rumah. Pada beberapa kampung dapat diindikasikan bahwa terjadi atau tidaknya konsultasi, banyak penghuni kampung yang tetap memperbaiki rumahnya.

LATAR BELAKANG SOSIAL EKONOMI BUDAYA

Kampung yang dimaksud disini adalah permukiman penduduk di perkotaan seperti yang telah disebutkan oleh Krausse's yang mempunyai kondisi lingkungan yang kumuh. Daerah kumuh ini timbul karena akibat pertumbuhan industrialisasi di kota-kota yang menarik penduduk pedesaan untuk bermigrasi ke kota. Penghasilan para imigran yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu untuk membangun atau menyewa tempat tinggal yang layak, sehingga mereka membangun rumah-rumah sederhana, yang biasanya bersifat semi permanen, yang kecil, berhimpit-himpitan. Lokasi permukiman kampung ini biasanya terletak di tanah kosong milik pemerintah swasta, di sekitar lokasi pabrik, di tepi atau di atas sungai, di tepi rel kereta api. Sebuah permukiman kampung kumuh biasanya mempunyai beberapa cirri fisik, diantaranya:

- a. rumah-rumah kecil dan berdempetan
- b. adanya gang-gang kecil dan berliku-liku yang membingungkan
- c. rumah umumnya dibangun dari bahan yang semi permanen (kayu, seng, papan, bilik bamboo), sehingga mudah sekali terbakar
- d. ruang dalam rumah tanpa ada ventilasi dan dihuni oleh sejumlah orang yang melebihi kapasitas rumah tersebut
- e. sanitasi, tempat pembuangan sampah dan penyediaan air bersih tidak ada, sehingga sering terjadi bencana banjir
- f. tingkat kesehatan penduduknya yang rendah, terutama untuk anak-anak dengan tingkat kematian yang tinggi

- g. berkaitan dengan status tanah dan status penghuni
- h. tata ruang hunian sangat tidak teratur

Bila dilihat dari segi sosial ekonomi, daerah perkampungan ini menunjukkan beberapa ciri:

- a. kepadatan penduduk yang tinggi dan banyaknya pengangguran
- b. tingkat kriminalitas yang tinggi
- c. pendidikan umumnya rendah, sehingga sebagian besar penduduk bergerak di sektor informal dengan pendapatan yang rendah
- d. kehidupan prostitusi baik secara terselubung maupun terang-terangan
- e. adanya hubungan kekerabatan antara para pendatang sehingga bentuk keluarga yang terbentuk merupakan keluarga yang luas
- f. tingkat mobilitas yang tinggi karena seringkali orang berpindah atau secara teratur kembali ke desa pada masa-masa tertentu



Latar belakang keadaan lingkungan yang semakin buruk inilah yang akhirnya mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan kampung di Jakarta yang dikenal dengan proyek Mohammad Husni Thamrin (MHT).

Program perbaikan kampung yang dilaksanakan oleh pemerintah memiliki tujuan meningkatkan martabat dan mutu kehidupan masyarakat di perkampungan serta mewujudkan secara lebih baik tata kehidupan lingkungan permukiman kampung yang baik, sehat, dan teratur. Pembiayaan yang dipergunakan bagi perbaikan kampung di Surabaya dapat diperoleh dari swadaya masyarakat sendiri, dana

subsidi pemerintah daerah atau pemerintah atasan, dana Inpres, maupun dana penggunaan bantuan kredit yang kesemuanya dipergunakan untuk program perbaikan kampung.

Sumber-Sumber pembiayaannya terdiri dari:

- Swadaya murni masyarakat.
- Dana bersama yang berasal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- Dana Inpres.
- Dana Bantuan kredit Bank Dunia.
- Dana APBN.
- Dana-dana Internasional lainnya. (www.worldbank.org, 2009)

RUANG LINGKUP PERBAIKAN

Dalam perbaikan kampung ini diutamakan pada perbaikan fisik kampung tersebut dengan sasaran pada perbaikan daerah tempat tinggal di kota yang buruk keadaannya, namun memenuhi syarat. Yang dimaksud memenuhi syarat disini adalah bukan merupakan permukiman liar seperti yang ada di pinggir kali maupun di pinggir rel kereta api, selain itu juga penduduk yang tinggal di dalam permukiman tersebut kepadatannya tidak tinggi sekali.

Program perbaikan kampung ini meliputi:
(diambil dari *Perbaikan Perkampungan, Pemda DKI*)

1. PRASARANA

- a. jalan dan jemabtan
- b. listrik/ ketenagaan
- c. rioling dan drainage

2.FASILITAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

- a. pos-pos kesehatan/ balai pengobatan
- b. tempat pendidikan dan kebudayaan

3.SANITASI

- a. MCK
- b. Sumur bor/ pompa air
- c. Bak-bak sampah

4.PERUMAHAN

- a. penyuluhan rumah setempat



Pada prinsipnya perbaikan perkampungan ini merupakan salah satu program peremajaan lingkungan kumuh, yang mengutamakan:

- a. tidak adanya penggusuran
- b. harga/ biaya perbaikan tersebut harus sesuai dengan kemampuan terjangkau oleh ekonomi masyarakat miskin tersebut
- c. peran serta masyarakat dalam perencanaan bangunan dan lingkungan
- d. peningkatan pendapatan keluarga dengan mengusahakan adanya kios, pelataran kaki lima

Fasilitas yang disediakan oleh KIP merupakan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu dalam merealisasi Program Perbaikan Kampung (KIP), penduduk yang mendapat bantuan perbaikan diikutsertakan dari tahap perencanaan dan menentukan prioritas perbaikan sehingga komponen perbaikan yang ditentukan tersebut merupakan pencerminan kebutuhan fasilitas bagi penduduk kampung yang ada.

Setelah implementasi KIP, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan sendiri baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai kebutuhan dan prioritas mereka terutama komponen-komponen yang masih belum dapat disediakan oleh KIP. Secara umum, setiap proyek mencakup dua komponen. Pertama, komponen dalam skala kota yang bakal mendukung aksesibilitas masyarakat. Bagaimanapun, apabila dalam

pelaksanaannya tidak terpikirkan dalam skala kota, apabila dimisalkan dalam satu kampung sering terjadi banjir, membangun saluran air hujan hanya berpikir skala kampung tidak akan berarti tanpa pemecahan pematuasannya dalam skala kota. Kedua, komponen yang dibangun merupakan kebutuhan didalam kampung itu sendiri.

Menurut Johan Silas komponen standar KIP yang lebih umum dilaksanakan di kampung Surabaya adalah :

- jalan kendaraan (sampai dengan 300 meter)
- jalan setapak (sesuai kebutuhan setempat)
- pengadaan air bersih (melayani lebih-kurang 30 KK)
- saluran air hujan (dengan gorong-gorongnya)
- MCK (Mandi, Cuci, Kakus) umumnya berupa komponen tambahan, karena untuk daerah perkotaan hampir semua rumah sudah memiliki secara perorangan).

Dengan demikian diharapkan program perbaikan kampung yang mengikutsertakan masyarakat kampung dapat menimbulkan kesadaran rasa tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan kampung itu sendiri.
(www.digilib.petra.ac.id,2009)

PROYEKSI MHT

Pelaksanaan proyek MHT yang terprogram dengan baik, pada dasarnya dapat membantu meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat menengah bawah terutama masyarakat miskin. Jika saja PEMDA DKI Jakarta sampai saat ini masih tetap konsisten dalam melanjutkan pelaksanaan Proyek *Kampoong Improvement Program (KIP)* atau program perbaikan kampung melalui Proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT), maka permasalahan pembongkaran permukiman kumuh tidak akan terjadi. Karena masyarakat selalu saja mempunyai pandangan yang negative terhadap penertiban permukiman kumuh. Penertiban permukiman kumuh selalu saja identik dengan penggusuran, sehingga hal ini dapat meresahkan warga yang tinggal di dalamnya.

Pelaksanaan Proyek Perbaikan Kampung yang kemudian dikenal dengan Proyek MHT itu sudah berjalan 30 tahun, yakni sejak 1969. Proyek MHT sampai sekarang

diakui kalangan pengelolaan perkotaan sebagai proyek yang tepat dalam menangani masalah permukiman kumuh di perkotaan.

Proyek ini menggabungkan terbatasnya dana dan majemuknya masalah perkotaan akibat terus bertambahnya penduduk kota dengan pengelolaan permukiman yang manusiawi. Perbaikan ini tanpa menggusur atau menghilangkan eksistensi warga atas hak-hak mereka. Warga kampung bahkan ikut menikmati dan memperoleh kebutuhan papan bersama warga kelas mana pun di satu kota yang berkembang.

Darrundono, mantan Koordinator KIP-MHT dalam lokakarya "Proyek MHT: Inovasi Pemecahan Masalah Permukiman Penduduk Miskin Perkotaan" pada hari Senin (20/3/2000) di Jakarta, mengemukakan, Proyek MHT tetap gayut dan paling aktual dalam menghadapi masalah permukiman perkotaan sampai sedikitnya dekade kedua abad 21.

Dia yakin, Proyek MHT sangat konseptual untuk diterapkan Pemda DKI Jakarta karena alasan-alasan kuat, yakni biaya rendah menjangkau kelompok masyarakat luas, teknologinya tepat guna dan mudah digandakan, melibatkan komunitas, tidak ada pembakuan perancangan dan bahan, terdapat diversitas dan yang lebih penting tidak ada pemindahan penduduk dari satu lokasi ke lokasi lain.

Hal tersebut di atas menjelaskan bahwa setidaknya proyek MHT sangat penting peranannya dalam pembangunan kota Jakarta. Dalam jangka pendek, tidak ada pilihan lain bagi Pemda DKI Jakarta selain melanjutkan Proyek MHT, guna mengatasi tumbuhnya berbagai kawasan permukiman kumuh di banyak lokasi. Hal ini seiring dengan meningkatnya urbanisasi yang mendorong banyak warga di desa pindah ke perkotaan.

Untuk itu perlu disikapi bahwa PEMDA DKI Jakarta maupun stakeholder terkait perlu menegaskan komitmen Pemda untuk melanjutkan Proyek MHT sebagai bagian dari usaha pemda untuk mewujudkan wajah Kota Jakarta, seperti kota-kota besar lain di kawasan dunia. Wajah kota yang indah, permukiman yang tertata dan penduduk tinggal di rumah yang nyaman sehingga mampu mendorong produktivitas melalui kegiatan kreatif.

Tantangan besar kelanjutan Proyek MHT ini, sebagaimana banyak diungkap kalangan pengamat maupun pemerhati masalah perkembangan permukiman perkotaan, adalah konsistensi pelaksanaannya oleh Pemda DKI Jakarta. Pemda

diharapkan tetap teguh menjadikan proyek MHT sebagai proyek yang memanusiaikan masyarakat Ibu Kota.

Selama ini arah Proyek MHT lebih pada penataan permukiman dibanding perbaikan permukiman kumuh. Penataan lebih pada menata lingkungan dan rumah penduduk dari yang buruk menjadi kawasan permukiman yang rapi. Warga pun tidak perlu cemas karena tidak harus pindah. Sarana dan fasilitas umum dilengkapi. Sementara, perbaikan kampung lebih sering diartikan menggusur dan membongkar kampung kumuh, dan menggantinya dengan rumah susun.

Pada pelaksanaan Proyek MHT IV (2000), banyak kalangan seolah kembali gelisah atas sinyalemen dan kebijakan Bappeda DKI Jakarta yang lebih bertumpu pada pembangunan rumah susun dalam titik berat perbaikan permukiman kumuh di Jakarta. Jika tak ada perubahan, porsi rumah susun itu mencapai 80 persen, dibanding penataan permukiman, yang hanya delapan persen.

Pada dasarnya kebijakan perombakan perbaikan kampung menjadi rumah susun untuk mengatasi permukiman kumuh di daerah bantaran sungai, kawasan pinggiran itu dilakukan karena ruang lahan yang tersedia sudah terbatas. Namun tidak semua kalangan dapat menerima konsep hunian vertikal ini.

Beberapa pihak menilai jika kebijakan tersebut diteruskan, maka Proyek MHT itu tidak lagi berpijak pada rakyat kecil. Menurut pengalaman selama ini, pembebasan tanah untuk rumah susun senantiasa menimbulkan masalah. Lebih lagi, tidak semua warga siap menghayati kehidupan di lingkungan rumah susun. Komunitas yang tanpa batas itu tampaknya menimbulkan banyak masalah sosial dan budaya.

Prof Dr Charles Surjadi dari Puslitkes Unika Atma Jaya mengingatkan, kegiatan perbaikan kampung tidak lepas dari sistem lingkungan kota yang mantap, seperti sistem pengadaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air kotor serta pengadaan rumah dan tata ruangnya. Dalam kaitan itu, masalah penting yang jarang disentuh adalah akses penduduk terhadap kepemilikan tanah.

Namun Kepala Dinas Perumahan Irsan Jamal mengatakan bahwa Proyek MHT masih akan terus dievaluasi dan pelaksanaannya di lapangan akan disempurnakan. Dalam era keterbukaan ini, juga terbuka kemungkinan banyak pihak memberikan masukan untuk penyempurnaan proyek perbaikan kampung kumuh di Jakarta.

Terlepas soal itu, penataan kampung maupun perbaikan kawasan perkampungan kumuh tidak bisa lagi ditunda-tunda. Jika tujuan Ibu Kota Jakarta ke arah kota internasional, dengan sendirinya semua sendi kehidupannya pun harus berstandar internasional. Namun warga Jakarta tetap berhak memperoleh pelayanan dan fasilitas hidup yang sama, seperti halnya warga lain di kota-kota dunia yang sudah mapan. Seperti hutan, tanaman besar maupun pohon perdu, bagaimanapun bisa saling melengkapi.

Selanjutnya, sebagai hasil evaluasi dari program MHT yang sudah terlaksana, mungkin perlu dilakukan perubahan-perubahan baik dari jenis program maupun lingkup perbaikannya. Jika saja sejak pertama kali program MHT yaitu 30 tahun yang lalu ini dilakukan dengan menggunakan konsep dari atas ke bawah atau *TOP DOWN approach*, saat ini pendekatan tersebut sudah kurang tepat. Lebih tepat jika PEMDA DKI Jakarta mencoba melaksanakan pendekatan dengan cara *BOTTOM UP approach*. Maksudnya di sini adalah jika 30 tahun yang lalu, warga hanya tinggal menikmati hasil dari proyek MHT, karena perencanaan dan pelaksanaan ditentukan dari atas yaitu Pemerintah. Sebaliknya, kini mereka harus didengar kemauannya, yaitu dengan menerapkan konsep Partisipasi Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Widyati P, Ir, MATRP. *Sebuah Pemaparan Tentang Penataan Kawasan Secara Partisipatif; Arsitektur Komunitas*. Jakarta. 2002.
- Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional. *Makalah Lokakarya Nasional Perumahan dan Permukiman*. Jakarta. 1992
- Departemen Perumahan Rakyat. INPRES no. 5 tahun 1990. *Tentang Peremajaan Permukiman Kumuh Yang Ada di Atas Tanah Negara*. Jakarta, 1990.
- Hardjakusumah, OS. *Kampung Improvement Programme* (Disertasi). London. 1978.
- Muhtadi Muhd, Drs. *Gejala Pemukiman Kumuh Jakarta; Selayang Pandang*, Departemen Pekerjaan Umum, 1987.
- Pemerintah Daerah DKI. *Jakarta's Kampung Improvement Programme, in The Context of City Settlement Problem*. Edisi 2. Jakarta. 1976
- Pemerintah Daerah DKI. *Perbaikan Perkampungan*. Dua Tahun Dalam Perkembangan. Jakarta. 1976.
- Properti Indonesia. *Peluang di Kampung Kumuh*. Majalah Bulanan No. 17. Edisi Juni. Jakarta. 1995.

- Silas, J. **Permukiman Kumuh di Jakarta**. Masyarakat Jurnal Sosiologi Perencanaan Sosial dalam Pengembangan Kota. Jilid 2. PT Gramedia PU. Jakarta. 1993.
- Skinner, reinhard J, John L Taylor and Emiel A Wegelin. **Shelter upgrading for the Urban Poor**. Island Publishing House Inc. 1987.
- Skinner, RJ, et al. **Shelter Upgrading for the Urban Poor, Evaluation of the Jakarta Kampung Improvement Programme**. 1987.
- . **Survey of Slum and Squatter Settlements**.

copyright